

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII.1. Visi, Misi, Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang yang dirangkum dalam 3 (tiga) masalah pokok bangsa yaitu merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, maka Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**

Untuk mencapai visi tersebut, akan dilaksanakan 7 (tujuh) Misi yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan atas Visi dan Misi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014-2019 akan menyelenggarakan agenda dan prioritas pembangunan yang dikenal dengan istilah *“Nawa Cita (9 Agenda Prioritas),* yang terdiri dari:

1. **Agenda 1** : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Prioritas Pembangunan : 1. Pelaksanaan luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan

- pertahanan negara Tri Matara terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
2. Perlindungan hak dan keselamatan warga negara di luar negeri khususnya pekerja migran;
 3. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim khususnya batas negara, kedaulatan maritim dan sumber daya alam;
 4. Penguatan peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia;
 5. Pengurangan (minimalisasi) dampak dari globalisasi, integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonomi nasional;
 6. Pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional dengan pendekatan kesejahteraan prajurit dan penyediaan alutsista secara terpadu di Tri Matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertahanan 1,5 % dari PDB dalam lima tahun;
 7. Perwujudan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional dan diversifikasi kerjasama pertahanan;

8. Penjaminan rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang profesional dan dipercaya masyarakat.
2. **Agenda 2** : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

- Prioritas Pembangunan** :
1. Pemulihan kepercayaan publik pada institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan;
 2. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi public;
 3. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta perluasan ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik;
 4. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

3. **Agenda 3** : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

- Prioritas Pembangunan** : 1. Peletakkan dasar-dasar desentralisasi asimetris untuk melindungi kepentingan nasional di kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi secara global dan membantu daerah-daerah yang kapasitas belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik;
2. Sinergi tata kelola pemerintahan sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Pelaksanaan regim desentralisasi sebagai ujung tombak tata pengelolaan pemerintahan menggantikan regim sektoral dan keuangan;
3. Pelaksanaan reformasi tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris;
4. Pemerataan pembangunan antarwilayah, antara Jawa dan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Timur Indonesia, antar kota dan desa;
5. Penataan kembali pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru;
6. Pengurangan anggaran daerah untuk *overhead cost* (biaya rutin) dan pengalokasian lebih banyak untuk pelayanan publik;
7. Pelaksanaan reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan

publik, serta pelaksanaan UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan;

8. Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara lebih maksimal termasuk pengelolaan keuangan dan pelayanan bagi daerah otonom; penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai.

4. **Agenda 4** : Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Prioritas Pembangunan :

1. Pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya;
2. Pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan;
3. Pemberantasan tindakan penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar;
4. Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang;
5. Penegakan hukum lingkungan;
6. Pemberantasan narkoba dan psikotropika;
7. Perwujudan kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat;
8. Perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarjinal;

9. Penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

5. **Agenda 5** : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Prioritas Pembangunan : 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;

2. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan kartu "Indonesia Sehat";

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan kepemilikan tanah seluas 9 juta Ha;

4. Pembangunan rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi;

5. Pelaksanaan jaminan sosial untuk seluruh rakyat pada tahun 2019.

6. **Agenda 6** : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Prioritas Pembangunan : 1. Pembangunan infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 km dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua;

2. Pembangunan 10 pelabuhan baru dan renovasi pelabuhan yang lama;

3. Pembangunan 10 bandara baru dan renovasi bandara yang lama;

4. Pembangunan 10 kawasan industri baru beserta pengembangan hunian buruhnya;

5. Pembangunan pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia, dan modernisasi pasar tradisional yang ada;
 6. Penciptaan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari;
 7. Peluncuran insentif kebijakan fiskal dan non fiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah;
 8. Peningkatan kinerja BUMN sebagai agen pembangunan;
 9. Pendiri Bank Pembangunan dan Infrastruktur;
 10. Peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi dan menjadikan instansi urusan hak cipta dan paten bekerja proaktif melayani para inovator dan para investor;
 11. Pembangunan sejumlah *Science and Techno Park* di daerah, politeknik dan SMK dengan prasarana dan sarana teknologi terkini;
 12. Peningkatan daya saing untuk meningkatkan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan potensi industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim dan pariwisata.
7. **Agenda 7** : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Prioritas Pembangunan : 1. Perwujudan kedaulatan pangan melalui perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi 3 juta ha sawah, penyiapan 1 juta ha lahan sawah baru di luar Jawa, pendirian Bank Petani dan UMKM, gudang dengan fasilitas

pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi;

2. Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar limbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain seperti industri, perumahan dan pertambangan;
3. Perwujudan kedaulatan energi melalui kebijakan pengurangan impor energi minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri, peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi (Pertamina, PLN, PGN), pembangunan pipa gas, pengembangan energi terbarukan;
4. Pengutamaan pemakaian batubara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri;
5. Perwujudan kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusi keuangan mencapai 50% penduduk, tax ratio terhadap GDP menjadi 16%, pengurangan utang pemerintah, pengaturan ketat penjualan saham bank nasional kepada investor asing;
6. Penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional melalui kerjasama swasta-pemerintah-perguruan tinggi khususnya sektor pertanian dan industri, serta riset dan pengembangan dasar.

8. **Agenda 8** : Melakukan revolusi karakter bangsa.

- Prioritas Pembangunan** : 1. Penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti;
2. Evaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional termasuk Ujian Akhir Nasional dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan muatan lokal dan aspek nasional dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal ika;
3. Subtansi Pendidikan dasar: 70% budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik (bagian dari revolusi mental), pendidikan tinggi: 60% politeknik dan 40% sain;
4. Pemberian jaminan hidup yang memadai bagi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil dengan pemberian tunjangan fungsional, pemberian asuransi keselamatan kerja, fasilitas yang memadai, pengembangan kelimuan dan promosi kepangkatan dan karir;
5. Pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama terutama wilayah dengan tingkat dan pelayanan pendidikan rendah dengan penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah yang berkualitas, terjangkau dan aman;

6. Rekrutmen dan distribusi pengajar (guru) yang berkualitas secara merata;
7. Inisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya;
8. Peningkatan pemberian subsidi kepada PTN untuk memperbesar akses warga miskin terhadap pendidikan tinggi;
9. Prioritas pembiayaan kegiatan penelitian pengembangan IPTEK unggulan secara regular dan terintegrasi dengan pengembangan pendidikan tinggi;
10. Penerapan kewajiban aparatur pemerintah untuk menganut *techno ideology* melalui pendidikan penguasaan teknologi dan penguasaan teknologi sebagai kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi.

9. **Agenda 9** : Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

- Prioritas Pembangunan** :
1. Penguatan pendidikan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antarwarga;
 2. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran hak-hak warga dan nilai-nilai kemanusiaan;
 3. Pembangunan kembali modal sosial melalui rekonstruksi sosial: membangun kembali kepedulian sosial, pranata gotong royong, melindungi lembaga-lembaga adat, membangun kembali karakter bangsa, membersihkan diri dari berbagai prasangka sosial - kultural - politik, membangun

- kepercayaan di antara anak bangsa, dan mencegah diskriminasi;
4. Optimalisasi pranata-pranata sosial dan budaya dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
 5. Pengembangan insentif khusus untuk mengangkat kebudayaan lokal dan membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa seperti pembangunan rumah pusat kebudayaan, kesenian, museum dan sarana dan prasarana olah raga;
 6. Peningkatan proses pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman akan kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan dengan menetapkan penugasan PNS di seluruh Indonesia.

VII.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Kebijakan umum pembangunan untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan melalui penetapan program prioritas sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan Misi Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada karakteristik wilayah dengan pendekatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui program prioritas yang dilaksanakan dengan titik berat yang kebijakan pelaksanaannya sesuai spesifikasi kebutuhan pembangunan. Kebijakan umum pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan misi pembangunan selengkapya sebagaimana table VII.1.

Program prioritas yang disertai dengan kegiatan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan didukung melalui pelaksanaan 6 (enam) agenda pembangunan dan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Misi 1 : Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa yang Berorientasi pada Layanan Masyarakat.

Agenda Pembangunan : Melakukan reformasi birokrasi yang bermartabat dan terpercaya, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Prioritas Pembangunan :

1. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan konsisten dan terpercaya;
2. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Program Prioritas :

1. Program pengembangan data / informasi;
2. Program kerjasama pembangunan;
3. Program perencanaan pembangunan daerah;
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
5. Program perencanaan sosial dan budaya;
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan dan keuangan daerah;
7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
8. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
9. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
11. Program pengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
12. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
13. Program penataan administrasi kependudukan;
14. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah;
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah;
17. Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan;
18. Program pengembangan data informasi perijinan investasi;
19. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Misi 2 : Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Berdaya Guna dan Berorientasi pada Keahlian, Profesional "*The Right Man On The Right Place*".

Agenda Pembangunan : Membangun tata kelola pemerintahan efektif, demokratis dan terpercaya.

Prioritas Pembangunan :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan perbaikan kualitas pelayanan publik, restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelayanan publik;
2. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dengan meningkatkan pengelolaan

dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, mewajibkan setiap SKPD untuk membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.

Program Prioritas

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
7. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah;
8. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
9. Program pendidikan kedinasan;
10. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
11. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
12. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
13. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
14. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa;
15. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;

16. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
17. Program kerjasama informasi dengan mas media;
18. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
19. Program penataan daerah otonomi baru.

3. Misi 3 : Mengembangkan Manajemen Pendidikan yang Berkualitas dengan Berorientasi pada Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Agenda Pembangunan : Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang bermutu tinggi dan berdaya saing.

- Prioritas Pembangunan :**
1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui wajib belajar 12 (duabelas) tahun dan pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas kepemudaan dan olahraga;
 2. Pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud terutama wilayah dengan tingkat dan pelayanan pendidikan rendah dengan penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah yang berkualitas, terjangkau dan aman;
 3. Rekrutmen dan distribusi pengajar (guru) yang berkualitas secara merata;
 4. Penerapan kewajiban aparatur pemerintah untuk menganut *techno ideology* melalui pendidikan penguasaan teknologi dan

penguasaan teknologi melalui kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi.

Program Prioritas

- : 1. Program pendidikan anak usia dini;
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Program pendidikan menengah;
4. Program pendidikan non formal;
5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
7. Program manajemen pelayanan pendidikan;
8. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda;
9. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
10. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
11. Program upaya pencegahan penyalagunaan narkoba;
12. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga;
13. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
14. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
15. Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
16. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

4. Misi 4 : Membangun Sistem Pelayanan Kesehatan yang Murah, Cepat, Ramah, dan Manusiawi.

Agenda Pembangunan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu dan dapat dijangkau seluruh masyarakat.

Prioritas Pembangunan : 1. Peningkatan layanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat;
2. Peningkatan peran masyarakat dalam pola hidup sehat melalui sosialisasi dan pendampingan di 19 (sembilan belas) kecamatan, 142 (seratus empat puluh dua) desa, dan 11 (sebelas) kelurahan.

Program Prioritas : 1. Program obat dan perbekalan kesehatan;
2. Program usaha kesehatan masyarakat;
3. Program pengawasan obat dan makanan;
4. Program pengembangan obat asli Indonesia;
5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Program perbaikan gizi masyarakat;
7. Program pengembangan lingkungan sehat;
8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
9. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
12. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan balita;
14. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;

15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
16. Program keluarga berencana;
17. Program kesehatan reproduksi remaja;
18. Program pelayanan kontrasepsi;
19. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB /KR yang mandiri;
20. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
21. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR;
22. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
23. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
24. Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-PADU.

5. Misi 5 : Membangun Percepatan dan Peningkatan Infrastruktur.

Agenda Pembangunan : Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Prioritas Pembangunan :

1. Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan transportasi darat (jalan dan jembatan), laut (sarana dan prasarana pelabuhan) dan udara (sarana dan prasarana bandar udara) dengan tetap terjaminnya keserasian dan kesinambungan pembangunan sesuai dengan daya dukungnya berdasarkan tata ruang;
2. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian, kelautan dan perikanan

sebagai komoditas unggulan daerah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah;

3. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana air bersih, permukiman dan perkotaan, drainase, pengolahan sampah, dan pemakaman umum untuk menciptakan pola hidup sehat;
4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
5. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar NKRI sebagai beranda depan NKRI;
6. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Program Prioritas

- : 1. Program pendidikan anak usia dini;
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program pendidikan non formal;
5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata;
6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya;
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata;
8. Program pembangunan jalan dan jembatan;
9. Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong;

10. Program pembangunan turap / talud / bronjong;
11. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan;
12. Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong;
13. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
14. Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
15. Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan;
16. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
17. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
18. Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
19. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
20. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
21. Program pengendalian banjir;
22. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
23. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
24. Program pengembangan perumahan;
25. Program lingkungan sehat perumahan;
26. Program pemberdayaan komunitas perumahan;
27. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial;

28. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
29. Program pengelolaan areal pemakaman;
30. Program perencanaan tata ruang;
31. Program pemanfaatan ruang;
32. Program pengembangan wilayah perbatasan;
33. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;
34. Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam;
35. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
36. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
37. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
38. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
39. Program peningkatan pelayanan angkutan;
40. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
41. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
42. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
43. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
44. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
45. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;

46. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
47. Program peningkatan pengendalian polusi;
48. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan;
49. Program pengendalian kebakaran hutan;
50. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
51. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
52. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
53. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
54. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
55. Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan;
56. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
57. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
58. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
59. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
60. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut;
61. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
62. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi;

63. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;

64. Program pengembangan wilayah transmigrasi;

6. Misi 6 : Meningkatkan Peran Agama, Adat, Budaya dalam rangka Menciptakan Masyarakat Talaud yang Rukun dan Damai.

Agenda Pembangunan : Meningkatkan peran seluruh *stakeholders* untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Talaud yang makmur, adil dan sejahtera sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Talaud.

Prioritas Pembangunan :

1. Peningkatan kerjasama dengan Lembaga Agama, Lembaga Adat, dan Lembaga Budaya untuk bekerja bersama-sama dalam menciptakan masyarakat Kepulauan Talaud yang rukun dan damai;
2. Peningkatan produktifitas rakyat dan sumber-sumber pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
3. Penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja;
4. Perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak-hak warga, nilai-nilai kemanusiaan, kaum perempuan dan anak-anak;
5. Optimalisasi pranata-pranata sosial dan budaya dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
6. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Program Prioritas

- : 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
6. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
8. Program pembinaan anak terlantar;
9. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
10. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
11. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
12. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
13. Program peningkatan kesempatan kerja;
14. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
15. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
16. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;

17. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
18. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
19. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
20. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
21. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah;
22. Program pengembangan nilai budaya;
23. Program pengelolaan kekayaan budaya;
24. Program pengelolaan keragaman budaya;
25. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya;
26. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
27. Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal;
28. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
29. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
30. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
31. Program pendidikan politik masyarakat;
32. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
33. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
34. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

35. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
36. Program peningkatan kesejahteraan petani;
37. Program peningkatan ketahanan pangan;
38. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan;
39. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan;
40. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan;
41. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan;
42. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
43. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
44. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
45. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
46. Program pemanfaatan kawasan hutan industri;
47. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;
48. Program perencanaan dan pengembangan hutan;
49. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
50. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
51. Program pengembangan pemasaran pariwisata;

52. Program pengembangan destinasi pariwisata;
53. Program pengembangan kemitraan;
54. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
55. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
56. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut;
57. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat;
58. Program pengembangan budidaya tangkap;
59. Program pengembangan perikanan tangkap;
60. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan;
61. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
62. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
63. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
64. Program peningkatan dan kerjasama perdagangan internasional;
65. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
66. Program pengembangan industri kecil dan menengah;
67. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
68. Program penataan struktur industri;
69. Program transmigrasi lokal;

70. Program transmigrasi regional;
71. Program bantuan sosial;
72. Program penataan administrasi kependudukan.
73. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

Tabel VII.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3		4			5	6	8	9
MISI 1 : Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa yang Berorientasi pada Layanan Masyarakat										
1.1	Terlaksananya reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.	Pemantapan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.	Mengembangkan iklim kerja dan disiplin aparat pemerintah daerah yang mendukung terciptanya pemerintah daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah (pendapatan, belanja, pembiayaan dan aset daerah).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. ▪ Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 	Persentase berjalannya SPI Jumlah kasus temuan BPK Persentase kasus kegiatan yang tidak selesai pada akhir tahun Persentase penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan pengamanan aset secara akuntabel	75%	100%	Wajib – Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan Perencanaan Pembangunan	Inspektorat, DPPKAD, SETDA
							199 kasus (18 kasus thn 2014)	0 kasus		
							85%	100%		
							75%	100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan dan keuangan daerah. ▪ Program penataan daerah otonomi baru. ▪ Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. ▪ Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah. 	<p>Persentase pengelolaan keuangan dan aset secara profesional dan kompetensi aparatur</p> <p>Persentase tingkat pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku</p>	80%	100%		
							85%	100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.2	Terwujudnya birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, dan non-diskriminatif.	Pemantapan pelaksanaan birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif dan non – diskriminatif.	Merealisasikan sistem birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, dan non-diskriminatif.	Menertibkan administrasi pemerintah berorientasi pada pelayanan masyarakat, birokrasi dan disiplin aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota. ▪ Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. ▪ Program pengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat. ▪ Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan dan keuangan daerah. 	<p>Tingkat predikat dalam akuntabilitas anggaran maupun program (Opini BPK)</p> <p>Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah penerimaan pendapatan daerah</p> <p>Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah</p> <p>PAD terhadap total penerimaan APBD</p>	<p>Tidak Wajar</p> <p>90%</p> <p>598 Milyar</p> <p>26</p> <p>3%</p>	<p>WTP</p> <p>100%</p> <p>826 milyar</p> <p>30</p> <p>9%</p>	Urusan Wajib	DPPKAD dan Inspektorat, BPM-PD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						PAD terhadap total pengeluaran APBD	3,1%	9,1%		
						Wajib pajak daerah dan jumlah penduduk	24,4%	29,5%		
						Nilai sumber pembiayaan alternatif yang dapat disediakan	500 juta	750 juta		
						Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali	75%	90%		
						Pendapatan asli desa terhadap APB desa	≥ 40%	≥ 75%		
1.3	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan	Peningkatan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi,	Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melibatkan seluruh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pembangunan daerah. ▪ Program perencanaan 	Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi	≥ 40%	≥ 80%	Urusan Wajib	Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	efisien.		pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien berdasarkan isu strategis dan kebutuhan masyarakat.	<i>stakeholders</i> , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	pembangunan ekonomi. ▪ Program perencanaan sosial dan budaya.	masyarakat Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Persentase ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang dibutuhkan Jumlah masukan tentang pembangunan dari masyarakat	95%	100%		
							75%	100%		
							80%	100%		
							378 penduduk	600 penduduk		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.4	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.	Pengendalian dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.	Meningkatkan kinerja evaluasi, pengendalian dan pelaporan hasil kinerja pembangunan daerah untuk mewujudkan transparansi hasil pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan perencanaan yang berkelanjutan.	Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. ▪ Program pengembangan data / informasi. ▪ Program pengembangan data / informasi / statistik daerah. 	<p>Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan</p> <p>Persentase dokumen laporan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah SKPD yang menyusun laporan kinerja</p> <p>Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD</p> <p>Jumlah SKPD yang telah memiliki indikator kinerja utama</p>	95%	100%	Urusan Wajib	BAPPEDA dan SETDA	
						85%	100%				
						30 SKPD	53 SKPD				
						89%	99%				
						5 SKPD	53 SKPD				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.5	Terwujudnya pelayanan perijinan terpadu.	Pemantapan pelayanan perijinan terpadu.	Mewujudkan pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan minimal dengan memastikan tersedianya indikator kinerja utama yang cukup solid untuk mengukur kinerja SKPD dan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas layanan publik dalam hal perijinan, layanan kesehatan, layanan sosial, ketenagakerjaan, informasi dan ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan. ▪ Program pengembangan data informasi perijinan investasi. ▪ Program penataan administrasi kependudukan. ▪ Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. 	<p>Jumlah unit pelayanan satu atap</p> <p>Persentase tingkat pelayanan perijinan</p> <p>Tingkat kepuasan masyarakat</p>	1 Unit	3 Unit	Urusan wajib dan Urusan Pilihan	KPPT, Dinas Kesehatan, BPLH, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Disperindagop dan UKM, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Sumber Daya Energi
1.6	Terwujudnya inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik,	Peningkatan inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk	Meningkatkan kemampuan inovasi dan kreatifitas pemerintah sehingga kualitas pelayanan publik semakin	Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah terutama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. 	Tingkat kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan,	≥ 75%	≥ 90%	Urusan Wajib	BKPM, BAPPEDA, SETDA

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	termasuk upaya pengembangan program non budgeter.	upaya pengembangan program non budgeter.	meningkat.	dalam merealisasikan kerjasama pembangunan.	▪ Program kerjasama pembangunan.	Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya) Persentase hasil konsultasi dan koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan	≥ 75%	≥ 95%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI 2 : Menciptakan Manajemen Pemerintahan yang Berdaya Guna dan Berorientasi pada Keahlian, Profesional "The Right Man On The Right Place"											
1.7	Terciptanya struktur pemerintahan yang efektif dan efisien.	Pelaksanaan restrukturisasi pemerintahan sehingga terealisasi sistem pemerintahan yang efektif dan efisien di Kabupaten Kepulauan Talaud.	Mengembangkan struktur birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi dan meningkatkan kinerja aparatur.	Menata kelembagaan dan berbagai aspek yang mengikutinya.	<ul style="list-style-type: none"> Program penataan daerah otonomi baru. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 	Perda penataan kelembagaan Jumlah daerah otonom baru (DOB) Persentase SKPD yang kelebagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Jumlah daerah kecamatan baru	-	1 Perda 1 DOB 100% -	1 Perda 1 Kecamatan	Urusan Wajib	SETWAN (DPRD)
1.8	Terciptanya sistem <i>recruitment by expertise</i> .	Aktualisasi sitem <i>recruitment by expertise</i> untuk memperbaiki sistem perekrutan PNS.	Memperbaiki sistem perekrutan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki sehingga	Merealisasikan sistem perekrutan dan penempatan PNS berdasarkan bidang ilmu dan keahlian (<i>the right men on the right place</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Program pembinaan dan pengembangan aparatur 	Jumlah sistem perekrutan dan penempatan PNS Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang	-	2 sistem 100%	2 sistem	Urusan Wajib	BKDD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			diperoleh PNS yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi.			sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya				
1.9	Terwujudnya pengembangan karir PNS berbasis kinerja.	Pelaksanaan pengembangan karir berbasis kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.	Merealisasikan sistem pengembangan karir berbasis kinerja bagi aparatur.	Pembenahan terhadap pola pembinaan karir PNS	<ul style="list-style-type: none"> Program pembinaan dan pengembangan aparatur 	<p>Persentase tingkat pengembangan karir PNS berdasarkan bidang ilmu dan ketrampilan.</p> <p>Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat penjenjangan struktural.</p> <p>Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis.</p> <p>Persentase pejabat fungsional yang mengikuti diklat penjenjangan fungsional.</p>	<p>≥ 60%</p> <p>50%</p> <p>80%</p> <p>75%</p>	<p>≥ 90%</p> <p>99%</p> <p>95%</p> <p>95%</p>	Urusan Wajib	BKDD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.10	Terwujudnya pelayanan prima.	Aktualisasi pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.	Mengembangkan etos kerja aparatur untuk peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.	a. Peningkatan keterbukaan informasi publik. b. Menerapkan <i>e-goverment</i> dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. ▪ Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa. 	Persentase tingkat penyebaran informasi tentang Perda dan Perbup baru.	50%	100%	Urusan Wajib dan Urusan Pilihan	149 SKPD
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. 	Persentase tingkat persebaran informasi pembangunan.	50%	100%		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program kerjasama informasi dengan mas media. 	Persentase tingkat jangkauan informasi pembangunan melalui media masa	40%	90%		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pelayanan administrasi perkantoran. 	Persentase tingkat penggunaan TIK dalam pelayanan pemerintah	65%	95%		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan 	Tingkat pelayanan	95%	100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<p>pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 	<p>terhadap kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan</p>				
1.11	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur.	Meningkatnya kapasitas aparatur melalui pendidikan formal dan informal dan pemberian beasiswa bagi aparatur.	<p>a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur.</p> <p>b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta diklat teknis, fungsional dan berjenjang</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Program 	<p>Persentase pegawai yang dapat meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas.</p> <p>Persentase tingkat pengetahuan dan ketrampilan PNS sesuai tupoksi.</p> <p>Persentase tingkat pengelolaan program dan kegiatan SKPD berdasarkan</p>	75%	100%	Urusan Wajib dan Urusan Pilihan	149 SKPD
							75%	100%		
							40%	100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan kedinasan. ▪ Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. ▪ Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. ▪ Program peningkatan disiplin aparatur. ▪ Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. 	pada target kinerja. Persentase tingkat pengetahuan aparatur pengelola komunikasi dan informasi. Persentase tingkat kualifikasi SDM pengawas. Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun Jumlah aparatur desa yang mengikuti diklat	50%	100%		
							<100%	100%		
							<5%	<1%		
							95%	99,90%		
							80%	100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						Tingkat rata-rata aparatur pemerintahan desa dengan pendidikan S1 per desa	<50%	>50%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
MISI 3 : Mengembangkan Manajemen Pendidikan yang Berkualitas dengan Berorientasi pada Peningkatan SDM										
1.12	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.	Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun dan pendidikan non formal.	Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan dan melaksanakan berbagai upaya yang diperlukan untuk merealisasikan wajib belajar pendidikan 12 tahun dan pendidikan non formal.	a. Pelaksanaan wajib belajar 12 (sembilan) tahun dan pendidikan non formal. b. Peningkatan partisipasi masyarakat buta huruf dan DO dalam pendidikan luar sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan anak usia dini. ▪ Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. ▪ Program pendidikan menengah. ▪ Program pendidikan non formal. 	Angka Melek Huruf Rata-rata lama sekolah Persentase APM SD Persentase APM SMP Persentase APM SMA/SMK Persentase APK SD Persentase APK SMP Persentase APK SMA/SMK Angka Putus Sekolah SD	99,58	99,95	Bidang Urusan Wajib - Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						8,80	12,00			
						91,51%	99,90%			
						80,96%	99,00%			
						66,18%	87,00%			
						98,46%	90,00%			
						93,50%	85,00%			
						92,47%	82,00%			
						7 Kasus	0 Kasus			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						Angka Putus Sekolah SMP	11 Kasus	0 Kasus		
						Angka Putus Sekolah SMA/SMK	9 Kasus	0 kasus		
						Persentase tingkat kelulusan SD	99%	100%		
						Persentase tingkat kelulusan SMP	99,34%	100%		
						Persentase tingkat kelulusan SMA/SMK	99,05%	100%		
						Persentase Jumlah guru SD yang berpendidikan S1	85,76%	95,00%		
						Persentase jumlah guru SMP yang berpendidikan S1	94,86%	99,00%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						Persentase jumlah guru SMA/SMK yang berpendidikan S1	99,53%	99,90%		
1.13	Terwujudnya pemberian beasiswa kepada murid-murid bertalenta, berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi.	Pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi.	Mengembangkan upaya pemberian beasiswa bagi para peserta didik yang berprestasi untuk mendorong iklim persaingan yang sehat.	Pemberian beasiswa bagi murid-murid bertalenta, berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program manajemen pelayanan pendidikan. ▪ Program bantuan sosial kependidikan kepada individu dan keluarga. 	Persentase siswa yang mendapatkan beasiswa	36%	50%	Bidang Urusan Wajib - Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.14	Terwujudnya perlakuan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan.	Perlakuan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan.	Memberikan insentif yang lebih baik bagi para guru di daerah terpencil dan kawasan perbatasan.	Perhatian khusus pada aspek kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan . 	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh tunjangan khusus berdasarkan tempat bertugas di daerah terpencil dan perbatasan	37%	75%	Bidang Urusan Wajib - Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.15	Terwujudnya kelembagaan sekolah yang	Pengadaan dan pengembangan	Mendorong berkembangnya sekolah yang	Peningkatan standar kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program manajemen pelayanan 	Jumlah SD yang berstandar nasional	-	15 SD	Bidang Urusan Wajib -	Dinas Pendidikan, Pemuda dan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	berstandar nasional.	n kelembagaan sekolah yang berstandar nasional.	berstandarnasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kepulauan Talaud.	sekolah menuju sekolah yang berstandar nasional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pendidikan ▪ Program pendidikan anak usia dini. ▪ Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. ▪ Program pendidikan menengah. 	<p>Jumlah SMP yang berstandar nasional</p> <p>Jumlah SMA/SMK yang berstandar nasional</p>	-	10 SMP	Pendidikan	Olahraga
1.16	Meningkatnya manajemen berbasis sekolah.	Peningkatan dan pementapan manajemen berbasis sekolah.	Mendorong pengembangan manajemen berbasis sekolah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang selaras dengan era global.	Mewujudkan manajemen berbasis sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan anak usia dini. ▪ Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. ▪ Program pendidikan menengah. 	<p>Jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)</p> <p>Persentase penerapan SPM pendidikan</p>	15 Sekolah	60 Sekolah	Bidang Urusan Wajib - Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.17	Meningkatnya kemampuan berbahasa	Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan	Mendorong peningkatan kemampuan berbahasa	Peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan anak usia dini. 	Persentase jumlah siswa yang memiliki kemampuan	3%	25%	Bidang Urusan Wajib - Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.	asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.	Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK untuk meningkatkan daya saing masyarakat Kepulauan Talaud dalam persaingan global.		<ul style="list-style-type: none"> Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Program pendidikan menengah. 	berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.				
1.18	Terwujudnya prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atlet-atlit daerah.	Terlaksananya prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atlet-atlit daerah.	Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi atlet dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional sebagai sarana untuk promosi daerah serta upaya meningkatkan kesejahteraan atlet-atlit daerah untuk menghasilkan atlet-atlit daerah yang berprestasi,	Peningkatan profesionalisme olahragawan secara menyeluruh dan berprestasi.	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pengembangan dan pemanfaatan 	<p>Jumlah kegiatan olahraga</p> <p>Persentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga</p> <p>Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur</p> <p>Jumlah kegiatan olahraga masal dalam 1 bulan</p>	8 kegiatan	12 kegiatan	Bidang Urusan Wajib - Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
							0,5%	0,8%		
							75%	90%		
							-	2 kegiatan		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			baik di tingkat nasional maupun internasional.		iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga.	Persentase masyarakat yang aktif melaksanakan minimal satu cabang olahraga minimal 1 kali seminggu	0,4%	0,8%		
						Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional	-	1 cabang		
						Jumlah atlet daerah yang dikirim ke <i>event</i> olahraga di luar negeri	-	2 Atlet		
						Persentase kebijakan nasional bidang olahraga yang telah ditindaklanjuti	25%	75%		
						Persentase kecamatan yang	90%	100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						mempunyai sarana olahraga untuk umum				
						Jumlah organisasi/klub olahraga	4 Klub	8 Klub		
						Jumlah gedung olahraga	-	4 Gedung		
1.19	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis.	Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda. ▪ Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. ▪ Program peningkatan peran serta kepemudaan ▪ Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan 	<p>Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina</p> <p>Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina</p> <p>Menurunnya persentase pemuda usia 20-30 tahun yang tidak bekerja</p> <p>Persentase kebijakan nasional bidang pemuda yang telah</p>	<p>1 Organisasi</p> <p>12 Organisasi</p> <p>35%</p> <p>25%</p>	<p>4 Organisasi</p> <p>30 Organisasi</p> <p>8%</p> <p>80%</p>	Urusan Wajib	13 SKPD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					kecakapan hidup pemuda. ▪ Program upaya pencegahan penyalagunaan narkoba.	ditindaklanjuti Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Persentase penduduk yang menggunakan <i>personal computer</i> Persentase penduduk yang menggunakan internet	5 Organisasi 5 Kegiatan ≥10%	8 Organisasi 8 Kegiatan ≥40%		
1.20	Terwujudnya fasilitas media massa.	Penyediaan fasilitas media massa.	Mendorong pengembangan fasilitas media massa yang representatif agar informasi disampaikan lebih berkualitas.	Pengembangan fasilitas media masa bagi masyarakat.	▪ Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. ▪ Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase tingkat minat baca masyarakat	65%	95%	Urusan Wajib	SETDA, Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.21	Meningkatnya proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi.	Pengembangan proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi.	Mendorong proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi.	Peningkatan proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 	<p>Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah.</p> <p>Jumlah perpustakaan daerah</p>	74%	90%	Urusan Wajib	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, SETDA, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.22	Terwujudnya teknologi inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai.	Dorongan penguasaan teknologi inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai.	Mendorong dan berperan dalam meningkatkan penguasaan teknologi inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan mereka serta mendorong peningkatan ekonomi daerah.	Peningkatan penggunaan teknologi inovatif bagi petani, nelayan dan pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 	<p>Jumlah kelompok masyarakat petani dan nelayan yang mengikuti pelatihan penggunaan teknologi inovatif</p> <p>Persentase kelompok masyarakat petani dan nelayan yang menggunakan teknologi inovatif</p>	15 Kelompok	30 Kelompok	Urusan Wajib dan Urusan Pilihan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, SETDA

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI 4 : Membangun Sistem Pelayanan Kesehatan yang Murah, Cepat, Ramah, dan Manusiawi											
1.23	Terwujudnya pelayanan kesehatan berbasis SPM dan MDGs, dengan standar biaya yang jelas dan terjangkau secara ekonomi.	Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis SPM dan MDGs. Dengan standar biaya yang jelas.	Meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis SPM dan MDGs. Menetapkan standar biaya yang jelas.	<p>a. Penurunan angka kematian ibu baru melahirkan dan anak baru lahir.</p> <p>b. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>c. Penerapan standar mutu di tingkat puskesmas dan rumah sakit beserta pengawasannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program usaha kesehatan masyarakat. ▪ Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. ▪ Program perbaikan gizi masyarakat. ▪ Program pengembangan lingkungan sehat. ▪ Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. ▪ Program standarisasi pelayanan 	<p>Angka usia harapan hidup</p> <p>Jumlah Kasus penyakit malaria</p> <p>Jumlah Kasus penyakit TBC</p> <p>Jumlah Kasus penaki HIV</p> <p>Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)</p> <p>Angka kematian balita</p> <p>Angka kematian ibu melahirkan per 100,00 kelahiran hidup</p> <p>Angka kematian neonatal</p> <p>Jumlah balita gizi buruk</p>	72,35	74,25	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, BKKBN-PP, Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit Bergerak Gemeh	
						100 Kasus	10 Kasus				
						75 Kasus	5 Kasus				
						1 Kasus	0 Kasus				
						2 Kasus	0 Kasus				
						2 Kasus	0 Kasus				
						2 Kasus	0 Kasus				
						15 Kasus	0 Kasus				
						2 Balita	0 Balita				

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					kesehatan. ▪ Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. ▪ Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. ▪ Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. ▪ Program keluarga berencana. ▪ Program kesehatan reproduksi remaja. ▪ Program pelayanan kontrasepsi. ▪ Program pembinaan peran serta	Jumlah bayi berat badan lahir rendah Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe Persentase kecamatan bebas rawan gizi Persentase populasi yang mengkonsumsi di bawah batas minimal Persentase rumah tangga	14 Bayi 75% 70% 80% 94,74% <2% ≥80%	0 Bayi 95% 90% 98% 100% <0,5% ≥98%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					masyarakat dalam pelayanan KB /KR yang mandiri. ▪ Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat. ▪ Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR. ▪ Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. ▪ Program pengembangan bahan	berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase rumah sehat Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase desa terkena kejadian luar biasa yang ditangani kurang dari 24 jam Persentase murid sekolah dasar yang mendapat pemeriksaan mulut dan gigi Persentase anak-anak usia 1 tahun yang diimunisasi	85% 50% 75% 10% 99%	99% 99% 98% 75% 100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	Persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja	75%	95%		
					▪ Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-PADU.	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	85%	100%		
						Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	75%	99%		
						Persentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan kesehatan	50%	99%		
						Jumlah komplain masyarakat tentang pengelolaan kesehatan	115 Komplain	2 Komplain		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi	75%	85%		
						Persentase partisipasi pria usia subur dalam menggunakan alat kontrasepsi	25%	50%		
1.24	Tersedianya dokter ahli di Rumah Sakit Umum Daerah Mala dan Rumah Sakit Bergerak Gemeh.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat kabupaten kepulauan Talaud pada RSUD Mala dan RS Bergerak Gemeh.	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Kepulauan Talaud melalui penyediaan dokter ahli pada RSUD Mala dan RS Bergerak Gemeh.	Penyediaan dokter ahli di Rumah Sakit Umum Daerah Mala dan Rumah Sakit Bergerak Gemeh.	<ul style="list-style-type: none"> Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. 	Jumlah dokter spesialis	7 dokter	14 dokter	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD, dan Rumah Sakit Bergerak Gemeh
1.25	Tersedianya secara merata dokter dan para medis di setiap	Peningkatan Pelayanan Kesehatan secara merata pada seluruh Puskesmas di	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga melalui penyediaan	Perekrutan dan penempatan SDM kesehatan berdasarkan analisis kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. Program 	Rasio dokter per satuan penduduk Rasio perawat per 100.000	0,00067 0,0026	0,00117 0,089	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD, dan Rumah Sakit Bergerak Gemeh,

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	puskesmas.	Kabupaten Kepulauan Talaud.	dokter di semua Puskesmas.	layanan dan rasio jumlah penduduk.	peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.	penduduk Rasio apoteker per 100.000 penduduk	0,0001	0,0025		Puskesmas
1.26	Tersedianya tenaga bidan yang profesional di setiap desa.	Peningkatan pelayanan bagi ibu hamil di setiap desa.	Meningkatkan pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan di setiap desa melalui penyediaan tenaga bidan yang professional.	Penyediaan tenaga bidan yang profesional di 142 desa dan 11 kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. ▪ Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. 	Rasio bidan per 100.000 penduduk	0,0001	0,0015	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, Puskesmas
1.27	Terjaminnya ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis.	Penyediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai di Rumah sakit dan Puskesmas.	Mewujudkan penyediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai di RSUD dan RS Bergerak Gemeh serta seluruh Puskesmas.	Penyediaan dan pengawasan obat-obatan dan peralatan medis.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program obat dan perbekalan kesehatan. ▪ Program pengembangan obat asli Indonesia. ▪ Program pengawasan obat dan makanan. 	Persentase ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis	40%	90%	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD, dan Rumah Sakit Bergerak Gemeh, Puskesmas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.28	Terwujudnya kesejahteraan bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan perawat dan tenaga kesehatan.	Menerapkan perlakuan insentif khusus bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan.	Peningkatan kesejahteraan bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan.	▪ Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.	Persentase perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan yang mendapatkan tunjangan khusus berdasarkan tempat bertugas	15%	30%	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, Puskesmas, BKDD
1.29	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.	Meningkatkan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan.	▪ Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.	Persentase peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan	50%	90%	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, dan Puskesmas.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
MISI 5 : Membangun Percepatan dan Peningkatan Infrastruktur										
1.30	Terwujudnya standar infrastruktur sekolah-sekolah.	Pengembangan dan peningkatan standar infrastruktur sekolah-sekolah.	Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara fasilitas sekolah-sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap dan perilaku mereka.	Peningkatan standar infrastruktur sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan anak usia dini. ▪ Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. ▪ Program pendidikan menengah. ▪ Program pendidikan non formal. 	Persentase fasilitas infrastruktur terhadap jumlah sekolah	78%	95%	Urusan wajib	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.31	Terwujudnya pengembangan teknologi informasi pendidikan.	Pengembangan teknologi informasi pendidikan.	Mendorong pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik	Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di setiap sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan anak usia dini. ▪ Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 	Persentase penggunaan teknologi informasi pendidikan di setiap sekolah	30%	85%	Urusan wajib	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			dalam penguasaan teknologi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan menengah. ▪ Program pendidikan non formal. 					
1.32	Meningkatnya sarana dan mutu pendidikan nonformal.	Peningkatan jumlah sarana dan mutu pendidikan nonformal.	Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara fasilitas sekolah-sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap dan perilaku mereka.	Penyediaan dan peningkatan sarana dan mutu pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan non formal 	Persentase ketersediaan sarana dan mutu pendidikan non formal	70%	95%	Urusan wajib	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.33	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan	Mengembangkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan	Pembangunan dan pengembangan akses pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program manajemen pelayanan pendidikan. ▪ Program pendidikan anak usia dini. 	Persentase ketersediaan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan	70%	95%	Urusan wajib	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	perbatasan.	kawasan perbatasan.	perbatasan dalam rangka pemerataan pendidikan yang berkualitas.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. ▪ Program pendidikan menengah. ▪ Program pendidikan non formal. 					
1.34	Terpenuhinya fasilitas pendidikan (formal dan informal).	Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas pendidikan (formal dan informal).	Menambah dan memelihara serta meningkatkan fasilitas pendidikan (formal dan informal).	Pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan anak usia dini. ▪ Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. ▪ Program pendidikan menengah. ▪ Program pendidikan non formal. ▪ Program pengembangan budaya 	Persentase ketersediaan fasilitas pendidikan yang bermutu pada pendidikan formal dan informal	75%	90%	Urusan wajib	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						baca dan pembinaan perpustakaan.				
1.35	Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.	Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mencerdaskan masyarakat.	Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 	Persentase jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi dan tunjangan lainnya	45%	75%	Urusan wajib	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.36	Meningkatnya jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan.	Peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan.	Mendorong pengembangan jumlah dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan penguasaan ilmu pengetahuan.	Pengembangan jumlah dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan penguasaan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 	Persentase jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan yang memenuhi standar pada pendidikan dasar dan menengah	25%	75%	Urusan wajib	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.37	Terealisasinya pembangunan sekolah	Pembangunan sekolah kejuruan di bidang	Membangun sekolah kejuruan di bidang kelautan/perikanan	Pembangunan sekolah kejuruan di bidang kelautan/perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Program pendidikan menengah. 	Jumlah sekolah kejuruan di bidang kelautan/perikanan	-	2	Urusan wajib	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	kejuruan di bidang kelautan/perikanan dan keteknikan.	kelautan/perikanan dan keteknikan.	an dan keteknikan.	n dan keteknikan		an dan keteknikan				
1.38	Terwujudnya pengembangan teknologi informasi kesehatan.	Pengembangan teknologi informasi kesehatan.	Mengimplementasikan teknologi informasi kesehatan untuk tenaga medis maupun staf kesehatan.	Pengembangan teknologi informasi kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perbaikan gizi masyarakat. ▪ Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. ▪ Program pengembangan obat asli Indonesia. ▪ Program Pengembangan lingkungan sehat. 	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang telah menggunakan teknologi informasi	8,70%	80%	Urusan wajib	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
1.39	Meningkatnya mutu pendidikan kesehatan kejuruan.	Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan	Meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan kejuruan.	Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pendidikan menengah. 	Tingkat mutu pendidikan kesehatan kejuruan yang memenuhi standar nasional	≥40%	≥80%	Urusan wajib	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
		kejuruan.								
1.40	Terwujudnya perhatian pada fasilitas kesehatan (formal dan informal).	Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan informal)	Menambah dan melakukan maintenance untuk peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan informal).	Pembangunan, peningkatan dan pengembangan fasilitas kesehatan (formal dan Informal)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan obat asli Indonesia. ▪ Program pencegahan dan penanggulangan agan penyakit menular. ▪ Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya. ▪ Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / 	Persentase fasilitas posyandu Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat Persentase rumah sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar Persentase posyandu purnama dan mandiri Persentase penduduk yang	75%	95%	Urusan wajib	Dinas Kesehatan
						42.485	28.390			
						85%	100%			
						50%	100%			
						65%	90%			
						60%	90%			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<p>rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit. ▪ Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata. ▪ Program peningkatan pelayanan kesehatan balita. ▪ Program Keluarga berencana. ▪ Program pelayanan kontrasepsi. 	<p>memanfaatkan rumah sakit</p> <p>Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas</p>	75%	90%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.41	Terwujudnya jumlah dan mutu fasilitas laboratorium berstandar internasional.	Peningkatan jumlah dan mutu fasilitas laboratorium berstandar internasional.	Meningkatkan jumlah dan mutu fasilitas laboratorium berstandar internasional.	Peningkatan jumlah dan mutu fasilitas laboratorium berstandar internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengawasan obat dan makanan. ▪ Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata. 	<p>Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan</p> <p>Persentase tongkat laboratorium yang berstandar internasional</p>	50%	100%		
1.42	Terwujudnya jalan dan jembatan perkotaan dan pedesaan.	Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan.	Mendorong dan berperan serta dengan pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ukuran	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembangunan jalan dan jembatan. ▪ Program pembangunan infrastruktur pedesaan. ▪ Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan. ▪ Program inspeksi 	<p>Persentase panjang jalan yang terehabilitasi</p> <p>Persentase jembatan yang telah terbangun dalam kondisi baik</p> <p>Persentase jembatan yang terehabilitasi</p>	37%	82%	Urusan Wajib	Dinas PU
							80%	99%		
							13%	1%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			perekonomian serta menurunkan ekonomi biaya tinggi.		<p>kondisi jalan dan jembatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program tanggap darurat jalan dan jembatan. ▪ Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan. 	<p>Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan</p> <p>Persentase panjang jalan per luas wilayah</p> <p>Panjang jalan negara dengan kualitas baik (mantap)</p> <p>Panjang jalan provinsi dengan kualitas baik (mantap)</p> <p>Panjang jalan kabupaten dengan kualitas baik (mantap)</p>	<p>0,28%</p> <p>0,11%</p> <p>54,25 Km</p> <p>8,45 Km</p> <p>32,08 Km</p>	<p>0,50%</p> <p>0,25%</p> <p>130,22 Km</p> <p>62,50 Km</p> <p>161,09 Km</p>		
1.43	Terwujudnya akses ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan,	Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan Provinsi Sulut untuk meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi	Pembangunan akses ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. ▪ Program pemanfaatan ruang. 	<p>Persentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum</p> <p>Persentase kecukupan sarana dan</p>	<p>75%</p> <p>70%</p>	<p>100%</p> <p>99%</p>	Urusan Wajib dan Urusan Pilihan	7 SKPD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
		dan perikanan.	pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk memudahkan penjualan hasil-hasil produksi serta mengurangi disparitasharga hasil-hasil produksi tersebut antara kota dan desa.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. ▪ Program pengembangan wilayah transmigrasi. ▪ Program pembangunan jalan dan jembatan. ▪ Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan. ▪ Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. ▪ Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam 	prasarana desa Persentase penduduk yang menggunakan HP / Telepon Jumlah sambungan telepon yang tersedia Persentase akses telepon/HP untuk pemerintahan di desa Persentase bangunan ber-IMB per satuan Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah perkotaan Persentase bangunan yang	90% 126 pelanggan 100% 85% - 7,91 Km ² 75%	98% 200 pelanggan 100% 100% 100% 12,50 Km ² 98%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					negeri. ▪ Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi. ▪ Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.	sudah dibangun di kawasan yang diperuntukkan Persentase luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya Jumlah peserta sosialisasi tata ruang Jumlah masukan dalam rangka penyempurnaan tata ruang Jumlah pelanggaran terhadap penggunaan tata ruang Jumlah PERDA/PERBUP yang mengakomodasi rencana tata ruang	50% 50 orang 23 pendapat - -	80% 1500 orang 30 pendapat 0 pelanggaran 13 PERDA/PERBUP		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						Kabupaten Kepl. Talaud				
1.44	Terciptanya pembangkit tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan.	Pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan seperti: matahari, angin, arus laut dan lainnya.	Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan terutama yang tersedia secara lokal dalam pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun maupun yang akan ditingkatkan.	Penyediaan pembangkit tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Jumlah jam padam listrik Jumlah UKM yang mendapat bantuan kelistrikan	95%	100%	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi
							78,46 jam	10 jam		
							576 UKM	650 UKM		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab										
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir												
1.45	Terwujudnya fasilitas pelayanan air bersih dan air baku, serta jaringan irigasi untuk pengairan lahan pertanian demi ketahanan pangan daerah.	Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku, serta jaringan irigasi untuk pengairan lahan pertanian demi ketahanan pangan daerah.	Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan pihak swasta untuk penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku, serta jaringan irigasi untuk pengairan lahan pertanian demi ketahanan pangan daerah.	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan air bersih dan air baku, serta jaringan irigasi untuk pengairan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. ▪ Program penyediaan dan pengelolaan air baku. ▪ Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. ▪ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 	<p>Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih</p> <p>Persentase penduduk berakses air minum</p> <p>Persentase desa / kelurahan yang terjangkau jaringan air minum</p> <p>Jumlah pelanggan PDAM</p> <p>Rata-rata kadar kebersihan / kualitas air PDAM</p> <p>Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik</p>	80%	99%	80%	100%	85%	100%	3.124 pelanggan	5.000 pelanggan	75%	99%	2 jaringan	5 jaringan	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum, BPLH, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, DPPKAD, BKPMDD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong. 	<p>Jumlah kejadian penyakit yang disebabkan konsumsi air tidak bersih / pencemaran air</p> <p>Nilai air minum PDAM</p> <p>Persentase desa/kelurahan/ kelompok yang menerima bantuan air bersih</p>	Rp. 1,23 Milyar	Rp. 3,5 Milyar		
1.46	Meningkatnya kualitas permukiman dan perumahan, fasilitas kebersihan dan sanitasi.	Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan, penambahan dan pemeliharaan fasilitas kebersihan dan sanitasi.	Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan, menambah dan memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi serta mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara	Pembangunan dan penataan permukiman dan perumahan, menambah dan memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi serta mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan perumahan. Program lingkungan sehat perumahan. Program pemberdayaan komunitas perumahan. 	<p>Persentase rumah layak huni</p> <p>Persentase keluarga yang telah memiliki rumah sendiri</p> <p>Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah yang</p>	88%	99%	Urusan wajib	Dinas PU, BPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop dan UKM, SETDA, BAPPEDA, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			fasilitas kebersihan dan sanitasi.	fasilitas kebersihan dan sanitasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial. ▪ Program pengelolaan areal pemukiman. ▪ Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 	<p>mempunyai akses air bersih</p> <p>Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah</p> <p>Persentase penanganan sampah</p> <p>Persentase luas permukiman yang tertata</p> <p>Tingkat pencemaran udara</p> <p>Tingkat pencemaran air</p> <p>Tingkat pencemaran limbah padat / sampah (B3)</p> <p>Tingkat pembuangan</p>	<p>7%</p> <p>15%</p> <p>70%</p> <p>-</p> <p>2,5%</p> <p>-</p> <p>10%</p>	<p>1 %</p> <p>90%</p> <p>95%</p> <p>0%</p> <p>0,5%</p> <p>0%</p> <p>1%</p>		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						limbah industri				
						Persentase desa/kelurahan yang telah mempunyai tempat pembuangan sampah	7,2%	20%		
						Persentase perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah	-	85%		
						Rata-rata produksi sampah yang terangkut per hari	15%	99%		
						Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai	15%	2,5%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						Rata-rata desa / kelurahan yang telah memiliki tempat pemakaman umum	15,1%	75%		
1.47	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana lalulintas darat.	Peningkatan sarana dan prasarana lalulintas darat.	Meningkatkan sarana dan prasarana lalulintas darat.	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana lalulintas darat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan ▪ Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. ▪ Program peningkatan pelayanan angkutan. ▪ Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. ▪ Program peningkatan kelaikan 	<p>Tingkat keamanan dan kenyamanan berlalulintas</p> <p>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalulintas darat</p>	85%	99%	Urusan Wajib	Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
							75%	95%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> pengoperasian kendaraan bermotor. ▪ Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. ▪ Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 					
1.48	Terwujudnya peningkatan Sarana dan prasarana transportasi udara.	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi udara.	Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana bandara melonguane dan bandara miangas.	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi udara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan . ▪ Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. ▪ Program 	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bandar udara Melonguane Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bandar udara Miangas	75%	98%	Urusan Wajib	Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
							5%	90%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					penyelesaian konflik-konflik pertanahan.					
1.49	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan.	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan penumpang dan pelabuhan feri untuk meningkatkan akses mobilisasi orang dan barang di Kabupaten Kepulauan Talaud.	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan ▪ Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. ▪ Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 	Jumlah pelabuhan laut Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan laut	12 Pelabuhan 85%	14 Pelabuhan 98%	Urusan Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, SETDA
1.50	Terwujudnya Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah	Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (Cagar	Melestarikan peninggalan benda dan situs bersejarah (Cagar Budaya).	Pemeliharaan peninggalan benda dan situs bersejarah (Cagar Budaya).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 	Jumlah situs budaya Persentase situs budaya yang terpelihara	5 situs budaya 1 situs budaya	8 situs budaya 8 situs budaya	Urusan Wajib	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	(Cagar Budaya).	Budaya).			kearsipan.					
1.51	Terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pembangunan ruang-ruang terbuka umum.	Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan ruang-ruang terbuka umum.	Meningkatkan dan memelihara lingkungan hidup dan ruang-ruang terbuka umum.	Pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan lingkungan hidup dan ruang-ruang terbuka hijau.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam. ▪ Program perencanaan tata ruang. ▪ Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. ▪ Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. ▪ Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 	<p>Jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB</p>	-	4 RTH	Urusan Wajib	BPLH, Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan energi, Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. ▪ Program peningkatan pengendalian polusi. ▪ Program pengendalian kebakaran hutan. ▪ Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. ▪ Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). ▪ Program pemanfaatan 					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<p>potensi sumber daya hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program rehabilitasi hutan dan lahan. ▪ Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. 					
1.52	Terwujudnya taman-taman rekreasi umum.	Pengembangan taman-taman rekreasi umum.	Mendorong dan mengembangkan fasilitas hiburan dan rekreasi umum yang sudah ada termasuk taman-taman rekreasi dan ruang-ruang terbuka umum untuk sarana penyegaran masyarakat dan sarana penarik wisatawan.	Pembangunan dan pengembangan taman-taman rekreasi umum.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam. ▪ Program perencanaan tata ruang. 	Jumlah taman-taman rekreasi umum	4 taman rekreasi	6 taman rekreasi	Urusan wajib dan urusan pilihan	BPLH, Dinas PU, BAPPEDA, Dinas pasar, kebersihan dan pertamanan
1.53	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.	Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana	Penyediaan, pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan ekowisata dan jasa 	Jumlah gedung kesenian	-	4 gedung	Urusan Wajib dan urusan pilihan	Dinas Kebudayaan dan pariwisata

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	pariwisata.		pariwisata.	sarana dan prasarana pariwisata.	lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan.	Jumlah tempat wisata yang memiliki sarana dan prasarana yang baik	-	3 Lokasi		
1.54	Terwujudnya infrastruktur dan fasilitas daerah perbatasan, rawan bencana dan pulau-pulau kecil terluar NKRI.	Pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah perbatasan, rawan bencana dan pulau-pulau kecil terluar NKRI.	Membangun infrastruktur dan fasilitas daerah perbatasan, rawan bencana dan pulau-pulau kecil terluar NKRI.	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas daerah perbatasan, rawan bencana dan pulau-pulau kecil terluar NKRI.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan wilayah perbatasan. ▪ Program pembangunan turap / talud / bronjong. ▪ Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong. ▪ Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong. ▪ Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamarga 	<p>Angka kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Persentase wilayah kebanjiran</p> <p>Persentase wilayah kekeringan</p> <p>Persentase wilayah abrasi (sungai) dan abrasi marin (pantai)</p>	<p>-</p> <p>2,63%</p> <p>7,35%</p> <p>78,36%</p>	<p>0%</p> <p>0,2%</p> <p>0,5%</p> <p>35%</p>	Urusan Wajib dan urusan pilihan	Dinas PU, BAPPEDA, BPKPD, BPBD, Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					an. ▪ Program pengendalian banjir. ▪ Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. ▪ Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. ▪ Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. ▪ Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					iklim laut					
MISI 6 : Meningkatkan Peran Agama, Adat, Budaya dalam rangka Menciptakan Masyarakat Talaud yang Rukun dan Damai										
1.55	Meningkatnya peran lembaga keagamaan dalam kerukunan umat beragama.	Pemantapan peran kelembagaan keagamaan.	Mengembangkan upaya untuk meningkatkan peran kelembagaan agama sebagai institusi yang mendorong pengembangan iman dan keselarasan hidup inter dan antar umat beragama.	Peningkatan peran lembaga keagamaan dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaud.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. ▪ Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). ▪ Program bantuan sosial untuk rumah ibadah. 	<p>Jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama</p> <p>Persentase pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama</p> <p>Persentase rumah ibadah yang diberikan bantuan</p> <p>Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama</p>	-	0 insiden	Urusan Wajib	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesbangpol dan Linmas, DPPKAD
						-	100%			
						85%	95%			
						4 lembaga	4 lembaga			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.56	Meningkatnya fungsi pranata sosial masyarakat (keluarga, kependuan, paguyuban).	Pemantapan fungsi pranata sosial (keluarga, kependuan, paguyuban).	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan fungsi pranata sosial untuk menghasilkan generasi yang mencintai ketertiban, taat hukum, dan saling menghargai.	Peningkatan dan pemantapan fungsi pranata sosial masyarakat (keluarga, kependuan, paguyuban).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. ▪ Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. ▪ Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). ▪ Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 	<p>Persentase desa / kelurahan yang memiliki "Rukun Kematian"</p> <p>Jumlah kajian tentang hukum adat dalam kebijakan daerah</p> <p>Jumlah tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam PERDA</p> <p>Persentase aktualisasi nilai-nilai hukum adat</p>	67%	90%	Urusan Wajib	BPM-PD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SETDA
							-	5 Kajian		
							-	10 tema		
							90%	99%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.57	Terwujudnya kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.	Pemantapan kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.	Mendorong pengembangan kearifan lokal serta budaya taat hukum di kalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih kondusif.	pengembangan kearifan lokal serta budaya taat hukum di kalangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan nilai budaya. ▪ Program pengelolaan keragaman budaya ▪ Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. ▪ Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. ▪ Program pendidikan politik masyarakat. 	<p>Persentase pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis</p> <p>Jumlah pengaduan mengenai kecurangan dalam pemilihan</p> <p>Jumlah masukan masyarakat yang diakomodasi dalam PERDA</p> <p>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana PILKADA</p> <p>Jumlah sosialisasi tentang PILKADA yang dilakukan</p>	-	100%	Urusan Wajib	BPM-PD, SETWAN (DPRD), Badan Kesbangpol dan Linmas,
							-	0 Kasus		
							6 pendapatan	10 pendapatan		
							90%	99%		
							1 sosialisasi	19 sosialisasi		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.58	Terwujudnya rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya).	Peningkatan rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya).	Mendorong pengembangan kearifan lokal serta budaya taat hukum di kalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih kondusif.	Peningkatan rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan nilai budaya. ▪ Program pengelolaan kekayaan budaya. ▪ Program pengelolaan keragaman budaya. ▪ Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 	<p>Jumlah kejadian masalah tentang perbedaan budaya</p> <p>Jumlah kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya</p> <p>Jumlah grup kesenian aktif</p> <p>Jumlah gedung kesenian</p>	0 kasus	0 kasus	Urusan wajib	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
							-	3 Kebijakan		
							19 grup	25 grup		
							-	4 gedung		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab												
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir														
1.59	Meningkatnya Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA).	Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA).	Melakukan revitalisasi HANKAMRATA untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pihak keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.	Peningkatan revitalisasi HANKAMRATA untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pihak keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal. ▪ Program pengembangan wawasan kebangsaan. ▪ Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 	<p>Jumlah Raperda yang diusulkan</p> <p>Jumlah PERDA yang diputuskan DPRD</p> <p>Waktu rata-rata pembahasan Raperda menjadi PERDA</p> <p>Jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa</p> <p>Jumlah PERDA yang bertentangan dengan kepentingan umum</p> <p>Jumlah Demo</p> <p>Persentase kinerja polisi pamong praja</p>	-	3 Ranperda	-	3 Perda	14 hari	7 hari	1 sosialisasi	19 sosialisasi	-	0 kasus	3 kasus	0 kasus	88%	99%	Urusan wajib	Badan Kesbangpol dan Linmas, DPRD (SETWAN), dan SETDA

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						Jumlah Pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	95 buah	153 buah		
						Rata-rata kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban per tahun per 1.000 populasi	0,18	0,02		
						Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman ketertiban yang direnspon dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan atau informasi diterima	94%	99%		
						Persentase masyarakat yang merasa puas dengan	90%	100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						tingkat ketentraman dan ketertiban di daerah				
						Jumlah kasus narkoba	0 kasus	0 kasus		
						Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat	5 kasus	1 kasus		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.60	Meningkatnya pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan.	Peningkatan pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan.	Mendorong koordinasi antar institusi-institusi yang berhubungan dengan masalah keamanan untuk mengamankan wilayah perbatasan dari gangguan-gangguan dan mencegah masuknya pelaku kejahatan trans nasional.	Peningkatan pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal. ▪ Program pengembangan wawasan kebangsaan. ▪ Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. ▪ Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber 	<p>Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa</p> <p>Persentase masukan masyarakat yang diakomodasi dalam PERDA</p> <p>Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha</p> <p>Jumlah pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah telaah dan kajian hukum yang disampaikan kepada Bupati / DPRD</p>	3 kasus	1 kasus	Urusan Wajib dan Urusan Pilihan	Badan Kesbangpol dan Linmas, DPRD (SETWAN), Dinas Kelautan dan Perikanan
50%	80%	-	3 PERDA							
-	0 kasus	-								
2 Kajian	7 Kajian									

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<p>daya laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 	<p>Jumlah peserta sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Angka kriminalitas</p> <p>Jumlah kasus pelanggaran sumber daya alam</p>	168 peserta	750 peserta		
1.61	Meningkatnya kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan.	Pemantapan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan.	Menciptakan sistem kehidupan masyarakat yang menghargai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan.	Menciptakan dan melaksanakan sistem kehidupan masyarakat yang menghargai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 	<p>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan</p> <p>Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</p> <p>Persentase Pemberdayaan Gender</p>	55,69%	60%	Urusan Wajib	BKKBN-PP, BPM-PD, BKDD
							57,89%	60%		
							87%	99%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					n. ▪ Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.	Persentase kelompok PKK yang terbina dan terdampingi	85%	100%		
1.62	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak.	Perlindungan terhadap hak-hak anak.	Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak.	Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak.	▪ Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. ▪ Program pembinaan anak terlantar.	Persentase tenaga kerja di bawah umur Jumlah program yang secara khusus menangani anak	10%	1%	Urusan Wajib	Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, BKKBN-PP
1.63	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan.	Perlindungan terhadap hak-hak perempuan.	Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terlibat aktif dalam perlindungan hak-hak perempuan.	Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.	▪ Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. ▪ Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. ▪ Program	Jumlah kasus KDRT Jumlah kasus kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita Jumlah program yang secara khusus menangani anak	6 kasus 9 kasus 1 program	1 kasus 1 kasus 3 program	Urusan Wajib	Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, BKKBN-PP

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.					
1.64	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak Lansia.	Perlindungan terhadap hak-hak Lansia.	Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak lansia.	Perlindungan terhadap hak-hak Lansia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 	<p>Jumlah pelanggaran terhadap HAM</p> <p>Persentase permasalahan HAM yang dapat diselesaikan</p>	5 kasus	1 kasus	Urusan Wajib	Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, BKKBN-PP
							75%	100%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1.65	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.	Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.	Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pendampingan dan pengolahan sumber daya alam, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktifitas kerja.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pendampingan dan pengolahan sumber daya alam, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktifitas kerja.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ▪ Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. ▪ Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. ▪ Program pembinaan eks penyandang penyakit 	<p>Angka laju pertumbuhan penduduk</p> <p>Angka kepadatan penduduk</p> <p>Jumlah akseptor KB</p> <p>Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja</p> <p>Angka partisipasi angkatan kerja</p> <p>Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga</p> <p>Angka pengangguran</p>	1,18	1,28	Urusan Wajib dan Urusan Pilihan	11 SKPD
							68,08	72,25		
							2.612	3.000		
							44.122	45.600		
							96,63	99,50		
							21,61%	6,1%		
							3,47	1,96		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). ▪ Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. ▪ Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. ▪ Program peningkatan kesempatan kerja. ▪ Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. ▪ Program penciptaan iklim usaha	Persentase penduduk yang bekerja terhadap total penduduk Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk Rasio ketergantungan Persentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan desa Jumlah LSM Jumlah desa yang telah memiliki standar pelayanan Persentase Jumlah pertemuan aparatur desa	51,80% 53,66% 53,37 80% 3 LSM 34 Desa 85%	57% 57% 45,56 95% 5 LSM 142 Desa 95%		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<p>kecil menengah yang kondusif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. ▪ Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. ▪ Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. ▪ Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 	<p>dengan masyarakat</p> <p>Persentase desa berstatus swasembada pangan</p> <p>Persentase peningkatan pendapatan aparatur desa</p> <p>Persentase penduduk 17 tahun keatas yang ber-KTP</p> <p>Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat</p> <p>Luas lahan tanaman pangan</p>	<p>31,69</p> <p>5%</p> <p>80%</p> <p>3 jenis</p> <p>3.915 Ha</p>	<p>80,98</p> <p>7%</p> <p>100%</p> <p>6 jenis</p> <p>15.000 Ha</p>		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. ▪ Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. ▪ Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. ▪ Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. ▪ Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 	Produksi tanaman pangan Produktivitas sektor pertanian Persentase luas wilayah produktif Nilai investasi di desa dan kecamatan Persentase penduduk yang memiliki lahan pertanian Luas lahan rata-rata yang dimiliki petani Jumlah komoditi pertanian yang menjadi komoditas ekonomi daerah/regional	34.900 ton 0,72 38% 2,15 Milyar 10,45% 65% 17 jenis	140.000 ton 1,3 75% 5,5 milyar 25% 80% 25 jenis		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kesejahteraan petani. ▪ Program peningkatan ketahanan pangan. ▪ Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan. ▪ Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan. ▪ Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan. ▪ Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan 	<p>PDRB dari sektor pertanian</p> <p>Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat petani</p> <p>Persentase kebutuhan ketahanan pangan yang dapat dipenuhi oleh produksi pertanian daerah</p> <p>Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi</p> <p>Jumlah peternakan ayam yang telah menggunakan teknologi</p>	<p>195,29 milyar</p> <p>14 juta</p> <p>50%</p> <p>1</p> <p>-</p>	<p>250 milyar</p> <p>17,5 juta</p> <p>85%</p> <p>4 lokasi</p> <p>4 lokasi</p>		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<p>lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. ▪ Program peningkatan produksi hasil peternakan. ▪ Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. ▪ Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. ▪ Program pemanfaatan kawasan hutan industri. ▪ Program pembinaan dan 	<p>Produksi perikanan</p> <p>Produksi daging</p> <p>Produksi telur</p> <p>Jumlah koperasi yang aktif</p> <p>Persentase perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup yang telah memiliki sertifikat AMDAL</p> <p>Angka kemiskinan</p> <p>PDRB per kapita</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p>	<p>10.165 ton</p> <p>2,11 juta Kg</p> <p>472,54 ribu Kg</p> <p>186 unit</p> <p>4 perusahaan</p> <p>10,27%</p> <p>11,376 Juta</p> <p>76,14</p>	<p>25.000 ton</p> <p>5 juta Kg</p> <p>950 ribu Kg</p> <p>200 unit</p> <p>1 perusahaan</p> <p>9,41%</p> <p>17,5 juta</p> <p>78,25</p>		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					penertiban industri hasil hutan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program perencanaan dan pengembangan hutan. ▪ Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. ▪ Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. ▪ Program pengembangan pemasaran pariwisata. ▪ Program pengembangan 	Pertumbuhan ekonomi	6,45	6,79		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> an destinasi pariwisata. ▪ Program pengembangan kemitraan. ▪ Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. ▪ Program pengembangan budaya tangkap. ▪ Program pengembangan perikanan tangkap. ▪ Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. ▪ Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. ▪ Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ▪ Program peningkatan dan kerjasama perdagangan internasional ▪ Program peningkatan dan pengembangan ekspor. ▪ Program pengembangan industri kecil dan menengah. 					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kemampuan teknologi industri. ▪ Program penataan struktur industri. ▪ Program transmigrasi lokal. ▪ Program transmigrasi regional. ▪ Program penataan administrasi kependudukan. 					